

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

2.1 Tinjauan tentang Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Definisi kemiskinan telah berkembang karena faktor penyebab, indikator, maupun masalah yang semakin kompleks. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam definisi ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Definisi tersebut didukung oleh Mardikanto (2019) bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mewujudkan hak-hak fundamentalnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi lain dari Suharto (2013), kemiskinan mengacu pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau karena negara kurang untuk menyediakan perlindungan sosial. Sementara itu menurut Nugroho dalam (Yulia, 2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk mencapai standar hidup minimum. Untuk melihat secara lebih komprehensif, pembahasan selanjutnya akan menguraikan dimensi kemiskinan.

2.1.2 Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, oleh karena itu David Cox dalam (Sjafari, 2014) membagi kemiskinan menjadi beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pecundang. Pemenang biasanya adalah negara-negara maju. Sementara itu, di negara berkembang semakin terpinggirkan.
2. Kemiskinan terkait dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (akibat marginalisasi dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kecepatan pertumbuhan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan akibat kejadian atau faktor lain di luar masyarakat miskin, seperti konflik, bencana alam.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat dimensi kemiskinan yang menggambarkan bagaimana kemiskinan dipengaruhi. Untuk memahami dampak dari masing-masing dimensi ini, penting untuk melihat ciri-ciri kemiskinan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut Rustanto (2015), kemiskinan mempunyai ciri-ciri dimensi ekonomi yang berarti tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna, akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Sedangkan ciri-ciri kemiskinan menurut Soeharto dalam (Yulia, 2020) adalah:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Tidak dapat bekerja karena sakit, cacat fisik atau mental.
3. Tidak dapat berfungsi secara sosial.
4. Rendahnya sumber daya manusia.
5. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa.
6. Kurangnya akses terhadap pekerjaan dan penghidupan berkelanjutan.
7. Kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan.
8. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak ada keterlibatan dalam komunitas.

Ciri-ciri ini mempertegas bahwa kemiskinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga melibatkan aspek non-material yang memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Untuk memahami lebih dalam, ciri-ciri ini dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk kemiskinan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Tipologi kemiskinan yang dijelaskan oleh (Suharto, 2020) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan 'kondisi umum' suatu masyarakat.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya, kehidupan, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sesuai etos kemajuan.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakaturan atau ketidakadilan struktur, baik politik, sosial, atau ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mengakses sumber daya.

Tipologi kemiskinan ini menggambarkan bagaimana kondisi kemiskinan dapat berbeda tergantung pada latar belakang penyebabnya. Untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam, perlu ditelaah faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan.

2.1.5 Faktor Penyebab Kemiskinan

Seseorang mengalami kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan demikian menurut Suharto (2009) kemiskinan disebabkan oleh empat faktor, yang saling terkait dengan beberapa aspeknya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor individual. Dalam hal ini, kemiskinan terkait dengan aspek patologis, terutama kondisi fisik dan psikologis. Orang menjadi miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan mereka dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial. Dalam hal ini, kondisi lingkungan sosial yang ditempati seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.
3. Faktor kultural. Faktor ini sering merujuk pada konsep budaya kemiskinan yang mengaitkan kemiskinan dengan kebiasaan gaya hidup atau pola pikir.

4. Faktor struktural. Dalam hal ini, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible*, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menuju kemiskinan.

Pemahaman atas faktor-faktor ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penyebab kemiskinan. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat kemiskinan secara lebih spesifik, diperlukan indikator-indikator yang dapat mengidentifikasi kondisi kemiskinan secara objektif dan terukur.

2.1.6 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi kehidupan seseorang atau keluarga yang berada di bawah kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang seharusnya dapat dibayarkan setiap individu untuk kebutuhan makanan yang setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya, menurut Badan Pusat Statistika dan Departemen Sosial yang dikutip oleh (Sjafari, 2014).

Seiring berjalannya waktu, indikator nasional untuk menghitung jumlah penduduk miskin terdapat 14 kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika, sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan ke puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat Sekolah Dasar/ tamat Sekolah Dasar.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kemiskinan yang multidimensional tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ketahanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan, salah satunya melalui perlindungan sosial. Perlindungan sosial dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai

perlindungan sosial menjadi relevan dalam memahami bagaimana kebijakan ini berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Tinjauan tentang Perlindungan Sosial

2.2.1 Definisi Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Suharto, 2013). Sejalan dengan (Wahyu et al., 2014) perlindungan sosial sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. *United Nations Children's Fund (UNICEF)* yang dikutip oleh (Wahyu et al., 2014) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan. Sedangkan menurut Barrientos dalam (Khaliq & Uspri, 2017), perlindungan sosial secara tradisional memiliki konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial merupakan kumpulan upaya publik dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

Perlindungan sosial dapat dipahami sebagai serangkaian kebijakan, program, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan, risiko, dan dampak kemiskinan, baik melalui transfer pendapatan, peningkatan status sosial, maupun intervensi publik untuk kelompok rentan. Selanjutnya, pembahasan

tentang tujuan perlindungan sosial akan menjelaskan bagaimana upaya ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperkuat ketahanan individu dan komunitas, serta mendukung pembangunan sosial yang inklusif.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Sosial

Menurut *World Bank* dalam (Khaliq & Uspri, 2017) perlindungan sosial ditujukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan bukan hanya terbatas pada tindakan yang hanya menyelesaikan gejala kemiskinan. Sedangkan menurut *International Labour Organization (ILO)* perlindungan sosial ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan, namun harus dilengkapi dengan strategi lain. Strategi yang dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dan rentan serta membantu individu maupun masyarakat dalam menghadapi goncangan-goncangan dalam hidup (Iping, 2020). Sedangkan menurut (Wahyu et al., 2014) tujuan utama perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Perlindungan sosial memiliki peran yang krusial dalam menangani kemiskinan secara komprehensif. Perlindungan sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.2.3 Perlindungan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Iping (2020), perlindungan sosial merupakan salah satu strategi atau langkah dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya dalam penelitian Khaliq & Uspri (2017), disampaikan bahwa pentingnya perlindungan sosial bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, dan peningkatan kualitas. Konsep perlindungan sosial pada awalnya lebih berfokus kepada tujuan jangka pendek, yang mana hal tersebut kerap mendapat kritik karena cenderung mengeluarkan banyak anggaran dan tidak menciptakan kemandirian. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan (Wahyu et al., 2014).

Perlindungan sosial mencakup berbagai upaya kebijakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi masyarakat miskin dan rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk konkret dari perlindungan sosial adalah bantuan sosial. Bantuan sosial menjadi bagian penting dari perlindungan sosial, karena memberikan dukungan finansial maupun non finansial yang dapat membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bantuan sosial diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat berkontribusi dalam pelaksanaan perlindungan sosial.

2.3 Tinjauan tentang Bantuan Sosial

2.3.1 Definisi Bantuan Sosial

Menurut Retnaningsih (2020) bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan masyarakat terpinggirkan. Menurut Suharto dalam (Retnaningsih, 2020) bantuan sosial adalah pelayanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal. Bantuan sosial bisa berasal dari pemerintah maupun non pemerintah dan didistribusikan langsung kepada masyarakat atau melalui pihak ketiga. Bantuan sosial dapat disalurkan dengan syarat maupun tanpa syarat.

Bantuan sosial berperan penting dalam menyediakan dukungan finansial dan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, penting untuk memahami tujuan dari bantuan sosial ini.

2.3.2 Tujuan Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menganggulangi permasalahan berisiko sosial. Sementara itu, menurut (Salsabila et al., 2024) bantuan sosial mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial, yaitu pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial untuk berfungsi secara sosial.
2. Perlindungan Sosial, untuk mencegah dan menanggulangi risiko guncangan dan kerentanan sosial bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

sehingga kelangsungan hidupnya dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan dasar minimum.

3. Pemberdayaan Sosial, untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan Sosial, skema guna menjamin penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
5. Penanggulangan Kemiskinan, memiliki arti bahwa bantuan sosial merupakan suatu kebijakan, program atau kegiatan, yang dilaksanakan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak.
6. Penanggulangan Bencana, serangkaian upaya yang ditujukan untuk kebencanaan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, tampak bahwa bantuan sosial memiliki keterkaitan erat dengan sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks perlindungan sosial.

2.3.3 Bantuan Sosial dalam Perlindungan Sosial

Bantuan sosial berfungsi sebagai bentuk intervensi non-kontributif yang menempati posisi penting dalam sistem perlindungan sosial. Di Indonesia, bantuan sosial dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang tidak tercakup dalam skema jaminan sosial berbasis iuran. Menurut (Suryadarma et al., 2024) bantuan sosial merupakan *non-contributory scheme* yang menjadi bagian mendasar dari perlindungan sosial, karena diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat miskin serta merespons risiko sosial yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bantuan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial nasional.

Pandangan serupa dikemukakan oleh *International Labour Organization* (ILO, 2017), yang menjelaskan bahwa sistem perlindungan sosial terdiri dari berbagai instrumen, termasuk bantuan sosial (*social assistance*) sebagai program non-kontributif. ILO menekankan pentingnya keberadaan bantuan sosial untuk menjangkau kelompok yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan berbasis iuran. *Governance and Social Development Resource Centre* (GSDRC, 2016), turut menegaskan bahwa bantuan sosial berupa voucher, tunai, atau bantuan barang kepada individu atau kelompok miskin, merupakan salah satu bentuk utama dari perlindungan sosial yang efektif dalam konteks pembangunan negara berkembang.

Dengan demikian, bantuan sosial merupakan bagian integral dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan menyeluruh kepada kelompok miskin dan rentan. Keberadaannya tidak hanya bersifat responsif terhadap risiko sosial, tetapi juga strategis dalam memperkuat kapasitas perlindungan sosial secara nasional. Integrasi bantuan sosial dalam kebijakan perlindungan sosial memungkinkan terwujudnya intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif.

Setelah memahami posisi bantuan sosial dalam sistem perlindungan sosial, penting untuk meninjau lebih lanjut bagaimana bantuan sosial berperan secara praktis dalam menanggulangi kemiskinan.

2.3.4 Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan

Menurut hasil penelitian Salsabila et al., (2024) program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah tentu saja tidak hanya ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Program bantuan sosial ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat penerima bantuan sosial di kemudian hari. Pemerintah harus melanjutkan program bantuan sosial untuk memberantas kemiskinan, dengan merombak sistem yang berlaku saat ini. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2019 – 2022, disertai dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 – 2023. Hal ini memperkuat rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan pendataan penerima manfaat, sehingga program dapat efektif dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial perlu mendapat perhatian khusus guna memastikan ketepatan sasaran penerima dan meminimalisir adanya penyelewengan oleh oknum.

Guna memahami peran bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan secara lebih konkret, penting untuk meninjau berbagai jenis bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

2.3.5 Jenis-Jenis Bantuan Sosial Kemiskinan

Kementerian Sosial telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penerima layanan dengan tujuan mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 (Huruswati et al., 2014). Berikut jenis bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia, serta penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosialnya.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang dibayarkan pemerintah kepada KPM setiap bulan melalui mekanisme rekening elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang yang bekerjasama dengan perbankan.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

BST merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah pandemi sebesar Rp 600.000/bulan.

4. Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

PENA merupakan program pelengkap yang memberikan bantuan dan pendampingan kepada KPM untuk mengembangkan usaha dengan tujuan akhir dapat mengikuti graduasi PKH.

5. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia. Diberikan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial.

6. Pemberian Bantuan Iuran (PBI)

PBI diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dalam bentuk iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulan.

Bantuan sosial sebagai salah satu instrumen utama perlindungan sosial, dalam efektivitas pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana program bantuan sosial sosial dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya mengukur keberhasilan, melainkan juga untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, dan peluang perbaikan di masa mendatang.

2.4 Tinjauan tentang Evaluasi

2.4.1 Definisi Evaluasi

Menurut Muryadi (2017) definisi evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Peter & Freeman dalam (Wirawan, 2012) menyebutkan definisi evaluasi dalam suatu penelitian adalah penerapan sistematis prosedur penelitian sosial dalam menilai konseptualisasi dan design, implementasi, dan utilitas program intervensi sosial. Kemudian dilengkapi oleh Ambiyar & Muharika (2019), evaluasi dalam riset yaitu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, membandingkan dengan indikator evaluasi, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan evaluasi dalam analisis kebijakan yaitu produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan (N. Dunn, 2003).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses mengetahui dan mengukur sesuatu dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, perlu diketahui tujuan dari kegiatan evaluasi pada suatu program.

2.4.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai manfaat dari objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Wirawan, 2012). Selain itu tujuan evaluasi yaitu:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Sebagai bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan.
5. Memberikan umpan balik bagi objek yang dievaluasi.

Tujuan evaluasi sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang dapat menentukan nilai dan manfaat dari objek evaluasi. Untuk memastikan bahwa tujuan evaluasi dapat tercapai secara optimal, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai karakteristik evaluasi itu sendiri. Karakteristik evaluasi mencerminkan bagaimana proses evaluasi dirancang dan dilaksanakan agar dapat memberikan hasil yang objektif, akurat, serta relevan dengan kebutuhan penelitian.

2.4.3 Karakteristik Evaluasi

Menurut N. Dunn (2003) terdapat enam karakteristik evaluasi kebijakan:

1. Efektivitas (*effectiveness*) mengacu pada sejauh mana suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari kebijakan. Dilihat dari kebermanfaatan bantuan dan kepuasan terhadap bantuan (Dehani et al., 2018).

2. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Usaha dalam hal ini dapat berupa waktu, tenaga, dan biaya (Dehani et al., 2018).
3. Kecukupan (*adequacy*) menggambarkan sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang melatarbelakangi munculnya suatu masalah. Kecukupan dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan KPM dan kecukupan jumlah bantuan (Dehani et al., 2018).
4. Kesetaraan (*equity*) berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Berupa pemerataan jumlah dan pemerataan pelayanan petugas (Dehani et al., 2018).
5. Responsivitas (*responsiveness*) menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Berupa pengetahuan KPM terhadap tahapan program dan proses pengaduan (Dehani et al., 2018).
6. Ketepatan (*appropriateness*) mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan suatu program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Ketepatan diukur berdasarkan tepat sasaran, tepat waktu, dan kesesuaian harapan KPM (Dehani et al., 2018).

Karakteristik evaluasi yang mencakup objektivitas, sistematis, dan relevansi dengan tujuan penelitian menjadi dasar dalam menentukan model evaluasi yang tepat. Beragam model evaluasi dikembangkan untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan evaluasi.

2.4.4 Model-Model Evaluasi

Menurut Ralph. W Tyler dalam (Wirawan, 2012) terdapat beberapa model evaluasi, di antaranya:

1. Model Berbasis Tujuan / *Goal Based Evaluation*

Secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program, atau proyek dapat dicapai atau tidak.

2. Model Bebas Tujuan / *Goal Free Evaluation*

Model ini mengevaluasi pengaruh yang sesungguhnya, objek yang ingin dicapai oleh suatu program.

3. Model Formatif dan Sumatif

Model formatif mengevaluasi untuk memperbaiki suatu objek, terutama jika objek sedang dikembangkan. Sedangkan sumatif untuk mengukur kinerja akhir objek yang dievaluasi.

4. Model *Context, Input, Process, Product (CIPP)*

Model CIPP merupakan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem.

5. Model Adversari

Model ini menyerupai proses pengadilan atau yudisial. Tujuan utama dari model ini yaitu mengurangi potensi bias dengan membentuk dua evaluator yang berbeda. Kedua evaluator tersebut adalah evaluator pro dan kontra.

Telah dijelaskan berbagai model evaluasi, yang mana masing-masing memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam menilai kinerja program. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan objeknya.

2.4.5 Jenis Evaluasi

Menurut Wirawan (2012) berdasarkan objeknya, evaluasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Dalam hal ini evaluasi guna menentukan kebermanfaatan kebijakan, tercapainya tujuan, dan pelaksanaan implementasi yang efisien serta akuntabel.

2. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai pencapaian tujuan program. Evaluasi program dapat memuat evaluasi proses dan evaluasi hasil.

3. Evaluasi Proyek

Proyek adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Evaluasi proyek guna menilai keberhasilan, mengetahui tantangan maupun hambatan, dan dilakukan upaya perbaikan.

4. Evaluasi Material

Evaluasi material untuk menilai kesesuaian dan pemanfaatan material yang efisien dan sesuai dengan proyek atau programnya.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi SDM bertujuan untuk menilai personalia atau kinerja pegawai.

Dari lima jenis evaluasi tersebut, dalam penelitian yang dilakukan yaitu evaluasi kebijakan, yang kemudian diturunkan melalui implementasi program. Untuk itu, pentingnya memahami evaluasi dalam sebuah kebijakan publik.

2.4.6 Evaluasi dalam Kebijakan Publik

Sejumlah ahli mengaitkan antara evaluasi dengan kebijakan publik. Rossi dan Freeman dalam (Wirawan, 2012) menyatakan evaluasi berkaitan dengan implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Masih dikutip oleh (Wirawan, 2012), dilengkapi oleh Vendung bahwa intervensi ini meliputi program-program substansif dan berorientasi pada proses. Evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan alat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, guna menentukan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan ke depannya.